

DIASPORA DAN IDENTITAS KOMUNITAS EKSIL ASAL INDONESIA DI BELANDA

DIASPORA AND IDENTITY OF EXCILE COMMUNITY FROM INDONESIA IN THE NETHERLANDS

Gusnelly

Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (P2SDR-LIPI)
Gedung Widya Graha, Jl. Gatot Subroto Kav. 10 Jakarta Selatan
e-mail: nellylipi@yahoo.com

Diterima: 15-3-2017

Direvisi: 12-4-2017

Disetujui: 3-6-2017

ABSTRACT

This paper is the result of research on Indonesian migration that focuses on the diaspora of the exile community in the Netherlands. The purpose to discuss this issue is to tell about the existence of an Indonesian community that has been exiled from the country for decades and became stateless or lost citizenship, because its passport was revoked by the Indonesian government. They are the generation who have been forced to move to several countries and choose to seek asylum in various Western European countries after the collapse of the Soviet Union. The history of their existence abroad as a result of the event of G30S/1965. They were abroad when the G30S occurred in the country. Their departure abroad was in the leftist (socialist) countries of the mid-1960s not because of political affairs but for various interests, but in fact it was related to the occurrence of the G30S/1965. In 1989 with the fall of communism and the end of the cold war after the collapse of the superpower of the Soviet Union, most of them have registered themselves as asylum seekers to several countries in Western Europe, including to the Netherlands. As a Dutch citizen, their descendants get education and work in the Netherlands. Their descendants feel that the Dutch or Europeans are his identity but the exiles keep their nationalism for Indonesia. We call that with long-distance nationalism.

Keywords: *Dutch, diaspora, exile community, asylum, citizenship.*

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang migrasi orang Indonesia yang fokus pada diaspora komunitas eksil di Belanda. Tujuan untuk membahas masalah ini adalah untuk menceritakan tentang keberadaan komunitas Indonesia yang sejak puluhan tahun terbuang dari tanah air dan menjadi *stateless* atau kehilangan kewarganegaraan, sebab pasportnya dicabut oleh pemerintah Indonesia. Mereka merupakan anak bangsa dari satu generasi yang terpaksa pindah ke beberapa negara dan memilih mencari suaka ke berbagai negara Eropa Barat pascaruntuhnya Uni Soviet. Sejarah keberadaan mereka di luar negeri sebagai akibat dari peristiwa G30S tahun 1965. Mereka sedang berada di luar negeri ketika terjadi peristiwa G30S di dalam negeri. Kepergian mereka ke luar negeri yaitu di negara-negara beraliran kiri (sosialis) di pertengahan tahun 60-an bukan karena hanya karena urusan politik, tetapi untuk berbagai kepentingan, namun pada kenyataannya disangkutpautkan dengan terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tersebut. Pada tahun 1989 dengan kejatuhan komunisme dan berakhirnya perang dingin setelah keruntuhan negara adi kuasa Uni Soviet sebagian besar mereka telah mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Anak-anak keturunannya merasa Belanda atau Eropa adalah identitasnya akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya yaitu Indonesia. Kami menyebutnya dengan *nasionalisme jarak jauh*.

Kata Kunci: Belanda, diaspora, komunitas eksil, suaka, kewarganegaraan.

PENDAHULUAN

Kajian tentang komunitas kaum eksil pada bagian ini lebih menekankan pada topik pembahasan tentang persoalan kewarganegaraan kaum eksil di Belanda.¹ Kaum eksil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa tahun 1965 terjadi di Indonesia, mereka sedang berada di beberapa negara sosialis (komunis) untuk berbagai macam kegiatan seperti menjadi wakil di organisasi regional/internasional, studi dan urusan lainnya. Kaum eksil oleh Presiden Abdurrahman Wahid disebut dengan istilah “kaum kelayapan” dan Hersri Setiawan menyebutnya dengan “orang-orang yang terhalang pulang” (Setiawan Hersri, 2004).

Dalam jangka waktu yang cukup lama, pembahasan tentang mereka yang menjadi korban dari terjadinya peristiwa G30S tahun 1965 tidak pernah diperdebatkan. Pembahasan tentang peristiwa tahun 1965 kembali dibicarakan setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada 1998. Seiring dengan itu, mengiringi gelombang demokratisasi, muncul pula wacana dari para akademisi termasuk kelompok sejarawan seperti Asvi Warman Adam yang menulis “Manipulasi Sejarah” berupaya melakukan “pelurusan sejarah” dengan mengungkapkan manipulasi sejarah di era Orde Baru.² Reaksi ini masih dilanjutkan lagi dengan mengemukanya keinginan untuk melakukan rekonsiliasi antara berbagai pihak yang tersangkut peristiwa 1965. Presiden Abdurrahman Wahid dengan beberapa kelompok yang berafiliasi secara kultural dengan NU mengadakan berbagai kegiatan untuk menjajaki kemungkinan proses rekonsiliasi tersebut.

¹ Tulisan dan data yang ada pada artikel ini diperoleh dari kegiatan penelitian tim Migrasi Internasional penelitian DIPA P2SDR bidang Kajian Eropa dan ditambah dengan informasi terbaru yang dilakukan oleh penulis sendiri. Penelitian tentang komunitas eksil ini dilakukan di tahun 2013 sebagai satu tema dari rangkaian penelitian tentang Migrasi dan Diaspora Orang Indonesia di Belanda. Penelitian tentang komunitas Eksil ini dilakukan oleh penulis sendiri bersama Amin Mudzakkir dan Wahyudi Akmaliyah.

² Menurut Asvi Warman Adam peristiwa 1965 sangatlah kabur, oleh karena itu sangat penting untuk menulis Sejarah Indonesia (secara keseluruhan, bukan hanya G30S) yang komprehensif dan ensiklopedis, bukan sekadar revisi sejarah Indonesia yang sudah ada.

Namun pembicaraan tentang masyarakat eksil masih belum mengemuka. Perhatian akademis terhadap kelompok eksil ini mulai dibicarakan ketika Gus Dur berkunjung ke Belanda dan bertemu beberapa di antara mereka yang menjadi bagian dari komunitas eksil.

Kaum eksil yang dimaksud dalam tulisan ini adalah orang Indonesia yang ketika peristiwa 1965 meletus sedang berada di luar negeri untuk berbagai macam keperluan. Mereka umumnya diutus oleh pemerintahan Soekarno dan sedang berada di negara-negara sosialis-komunis (Hill, 2008; Mudzakkir, 2013). Ada di antara mereka yang tinggal di luar negeri sebagai pejabat negara, ada yang sedang menjalankan tugas sebagai diplomat, sebagai mahasiswa, utusan organisasi serikat pekerja atau partai dan sebagai duta kesenian yang sedang diundang pentas di berbagai negara. Negara yang mereka tempati adalah beberapa negara sosialis bagian dari Uni Soviet seperti Rusia, Cina, Rumania, Albania, Czechoslovakia, Vietnam, dan juga Korea Utara. Di luar itu, kaum eksil juga merujuk pada kaum Tionghoa Indonesia yang melakukan eksodus ke luar negeri beberapa saat setelah peristiwa 1965 untuk menghindari aksi pembersihan oleh militer dan kelompok-kelompok sipil.

Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan *stateless* tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia. Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru (Sipayung, 2011; Setiawan, 2004). Mereka terhalang pulang karena tuduhan yang tidak dipahaminya, disangkutpautkan dengan partai komunis. Padahal belum tentu mereka berada di luar negeri untuk kepentingan partai komunis itu sendiri. Mereka diperbolehkan pulang ke Indonesia asalkan mengakui kesetiaan terhadap pemerintah yang baru dan juga harus menyetujui pernyataan bahwa G30S didalangi oleh PKI dan Soekarno ikut terlibat di dalamnya. Jika mereka menolak maka berarti berseberangan dengan garis politik Orde Baru rezim Orde Baru. Pengumuman hasil *screening* dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri pada tanggal 15 Mei tahun 1966 (Hill, 2010; Gusnelly, 2013).

Dalam perkembangannya, banyak eksil Indonesia yang tersebar di berbagai negara sosialis-komunis bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Di sana mereka membangun kehidupan baru. Sebagian besar mengajukan aplikasi untuk menjadi kewarganegaran setempat dan akhirnya diterima. Meskipun demikian, ikatan dan rasa kepemilikan mereka terhadap Indonesia tidak hilang. Dengan segenap cara mereka tetap aktif membangun komunikasi baik di antara mereka atau dengan teman sejawat lain yang mempunyai perhatian terhadap situasi di Indonesia.

Tulisan ini membahas diaspora orang Indonesia di Belanda, khususnya tentang kelompok eksil yaitu mereka yang terusir di tahun 1965 karena adanya peristiwa G30S. Ternyata jarak jauh dan waktu yang lama mereka habiskan di negeri yang baru, nasionalisme mereka tidak pudar. Mereka tetap merasa sebagai orang Indonesia. Identitas formal tidak mereka butuhkan jika hanya ingin menyatakan dan menunjukkan bahwa mereka adalah orang Indonesia. Keputusan untuk menjadi imigran suka di negeri yang di masa lalu telah menjajah tanah airnya bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Nilai-nilai kecintaan dan nasionalisme terhadap tanah airnya Indonesia masih belum pudar meskipun telah terbangun jauh dari tanah airnya itu. Sekarang kewarganegaraan mereka bermacam-macam, mengikuti negara di mana mereka tinggal, tetapi secara politik dan ideologi mereka adalah kaum nasionalis jarak jauh.

MIGRASI DAN PEMBENTUKAN KOMUNITAS DIASPORA

Pembahasan tentang diaspora akan berkaitan dengan pembahasan migrasi transnasional di mana berbagai budaya mewarnai terjadinya proses pembentukan identitas baru di tempat yang baru di luar negara asalnya. Identitas adalah sebuah konstruksi sosial. Migrasi dan diaspora menjadi elemen yang melekat erat dengan konstruksi identitas dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara. Namun pada era belakangan, konstruksi identitas terkait dengan hubungan antara komunitas diaspora dengan jaringan transnasional di negara asal nenek

moyangnya yang menjadi mudah melalui sarana komunikasi, teknologi, dan transportasi yang lebih maju.

Virinder S. Kalra dan Raminder Kaur (2005) mengatakan bahwa ada keterkaitan antara diaspora dengan migrasi dan etnisitas. Imigran dalam studinya dikatakan sebagai komunitas dan ketika jumlah mereka semakin bertambah banyak dalam periode waktu tertentu, mereka tidak bisa kembali ke negara asalnya. Oleh karena itu, migrasi dan diaspora menurut Shuval (2000) menjadi elemen yang melekat erat dengan persoalan pembentukan identitas suatu bangsa dan menjadi bagian penting dalam struktur sosial pada komunitas etnik di berbagai negara.

Bicara tentang diaspora orang Indonesia di Belanda, seringkali orang mengkaitkan dengan adanya hubungan kolonialisasi di antara keduanya. Keterkaitan antara migrasi dan kolonialisme sebagai pembentuk diaspora, sama akan halnya dengan terjadinya diaspora orang Cina di Malaysia, di Singapura, diaspora orang Amerika, dan Spanyol di Filipina. Demikian pula dengan keberadaan diaspora orang Suriname, lalu diikuti dengan diaspora orang Indonesia, salah satunya diaspora Maluku di Belanda. Penjajahan bangsa Barat dan ekspansi ekonomi mendorong masyarakat jajahan untuk migrasi (pindah) karena tenaga mereka diperlukan. Mereka tinggal permanen dan akhirnya menetap kemudian membangun kultur baru yang merupakan perpaduan antara kultur asli dengan kultur di tempat yang baru (Shuval, 2000; Crammer, 2000).

Pembentukan diaspora secara klasik juga berkaitan erat dengan pergerakan (*movement*), keluar (*exile*) dan merasa kehilangan kesempatan untuk kembali (Kalra & Kaur, 2005, 10 - 4). Sejarah migrasi yang sudah dimulai sejak masa kolonial tersebut secara bertahap mengalami perubahan *trends* seiring dengan perubahan situasi politik dan negara Indonesia (lihat tabel 1 di bawah). Pada masa penjajahan Belanda terjadi migrasi oleh mereka yang merupakan kelompok Indo-Europeanen.

Tabel 1. Sejarah Migrasi Orang Indonesia ke Belanda dalam Beberapa Periode

Era Kolonial (sebelum Kemerdekaan)	Era awal 1940an- 1945	Era Tahun 1949-1958	1965
<ul style="list-style-type: none"> Abdus Zamad yaitu seorang duta besar Kesultanan Aceh untuk Belanda, pada awal abad ke 17-an sudah ada yang datang lalu menetap sampai meninggal dan dimakamkan di Belanda. Pada akhir abad ke-18 banyak pribumi keturunan Belanda/Eropa yang sudah mulai berdatangan ke Belanda karena mereka sudah memeluk agama Kristen dan memiliki kemampuan berbahasa Belanda. Pada awal abad ke 20-an sejumlah anak-anak muda diundang datang ke Belanda untuk menempuh pendidikan sebagai dampak dari diberlakukannya politik etis (<i>De ethische politiek</i>) dan melahirkan generasi pembangkit gerakan nasionalisme di Hindia-Belanda Pada pertengahan tahun 1930-an, terjadi migrasi tenaga kerja dalam berbagai sektor yaitu para pekerja kapal, pekerja restoran dan tenaga kasar lainnya di bidang industri. 	<ul style="list-style-type: none"> Periode tahun awal tahun 1940-an-1945 terjadi pula migrasi besar-besaran orang Eropa-Indonesia yaitu mereka yang berasal dari keturunan campuran Indo-Europeanen Pada tahun yang sama di antara tahun 1945 dan 1965 terjadi pula migrasi besar-besaran yang dilakukan kelompok Indo Belanda ataupun orang Indonesia ke negara Belanda. 	<ul style="list-style-type: none"> Periode tahun 1951-1956, yaitu gelombang terbesar masuknya orang Maluku Pada tahun 1957 terjadi pula migrasi atas anak-anak keturunan Indo karena diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan yaitu UU No 62 tahun 1958 Periode tahun 1958, yaitu gelombang masuknya orang-orang yang tidak menerima proses nasionalisasi di Indonesia. 	<ul style="list-style-type: none"> Migrasi kelompok etnis Cina Indonesia karena situasi politik yang tidak stabil karena peristiwa G30S/PKI Migrasi komunitas eksil tahun 1967 dan akhir tahun 1989. Migrasi oleh masyarakat pribumi Indonesia (pekerja/mahasiswa) yang terkait dengan peristiwa tahun 1965 Dimulai pada tahun 1970-an, permintaan untuk mengisi kekurangan tenaga kerja keperawatan Belanda dan berakhir di akhir tahun 1980-an. Pada akhir tahun 1990-an kegiatan perekrutan tenaga perawat dilakukan lagi oleh agen tenaga kerja untuk dikirim ke Belanda.

Sumber: data diolah dari Imhoff, 2004 ; Wittermans, 1955; Hisyam, M., 1996; Gusnelly, 2005.

Terdapat beberapa periode migrasi yang dilakukan oleh kelompok Indo-Belanda di era kolonialisasi. Mereka dikenal dengan beberapa istilah seperti *Indisch Nederlander* atau *Indisch*. Migrasi yang dilakukan oleh kelompok kaum keturunan ini bisa dapat dikategorikan sebagai migrasi permanen (*permanent migration*). Misalnya, pada masa pendudukan Jepang (1939-1945), anak-anak Indo dan nyai-nyai Belanda, pindah ke Belanda dan sebagian besar tidak kembali lagi ke Indonesia, hanya saja jumlahnya tidak diketahui. Kemudian ketika terjadi penyerahan kedaulatan Indonesia di tahun 1949, mayoritas penduduk Indo-Belanda pergi pindah ke Belanda (Imhoff, 2004).

Data lain menyebutkan bahwa aktivitas migrasi keturunan Indo ini sudah berlangsung sejak awal tahun 1946 sampai di tahun 1965 dan jumlahnya mencapai 300.000 orang atau sekitar 2,5 persen dari total penduduk Belanda yang berjumlah 12 juta jiwa. Dalam rentang tahun yang sama pula, dampak dari pemberlakuan UU No 62 tahun 1958 tentang kewarganegaraan menyebabkan terjadi lagi migrasi atas anak-anak keturunan Indo. Undang-undang kewarganegaraan memaksa orang-orang Eropa-Indonesia harus memilih kewarganegaraan, Indonesia atau Belanda. Jika ingin menetap mereka harus melalui proses naturalisasi dan jika ingin tetap sebagai orang Belanda (*Europeens*) mereka harus meninggalkan Indonesia (Imhoff, 2004).

Tabel di atas menunjukkan bahwa aktivitas migrasi oleh masyarakat Hindia Belanda (Indonesia) disebabkan karena terjadinya situasi yang tidak stabil atau peristiwa yang mengharuskan individu mencari tempat lain untuk mendapatkan keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Perubahan situasi yang sangat mendadak telah mempengaruhi pikiran dan mendorong orang untuk memilih pindah atau migrasi ke wilayah lain. Migrasi dapat pula dilakukan secara berkelompok maupun sendiri-sendiri. Pilihan migrasi menjadi penting ketika terjadi kondisi yang membuat individu atau kelompok menjadi tidak nyaman. Pendapat ini sesuai dengan Daniel Byman (2002) yang menyitir Barbara Walters bahwa ada suatu situasi yang mendorong individu atau kelompok

memutuskan untuk migrasi atau dengan kata lain kami menyebutnya terjadinya krisis. Krisis tidak hanya pada hal ekonomi semata akan tetapi ada krisis politik dan sebagainya yang mendorong individu membuat putusan untuk pindah.

MENCARI SUAKA KE BELANDA

Dalam konteks migrasi, komunitas eksil adalah salah satu komunitas diaspora Indonesia. Komunitas eksil terusir dari negaranya, lalu memilih menjadi imigran permanen di negara lain meskipun mereka tidak pernah inginkan. Mereka migrasi ke luar negaranya, berkeluarga, berkembang di daerah yang baru untuk jangka waktu yang lama. Keberadaan mereka diluar negeri disebabkan oleh krisis dan kekacauan politik di Indonesia. Situasi politik yang kacau di tahun 1965 dan dilekatkan dengan isu ideologi menyebabkan mereka terlarang dan dicegah untuk kembali ke negara asalnya padahal mereka sendiri tidaklah paham apa sebenarnya yang terjadi di dalam negeri. Selama puluhan tahun kaum eksil terpisah dari tanah airnya dan tidak bisa bertemu dengan keluarganya di Indonesia (Sipayung, 2011, 12). Hak-hak sipilnya dan hak sebagai warga negara Indonesia terampas selama puluhan tahun oleh pemerintah Orde Baru.

Dalam pengasingannya selama puluhan tahun, mereka yang bekerja sebagai seniman masih tetap berkarya, sehingga cukup banyak karya seni yang lahir dari para eksil yang berada jauh dari negaranya. Seperti Kuslan Budiman, masih sering berkirim tulisan cerita pendek atau novel ke beberapa penerbit lokal di Indonesia. Keistimewaan yang patut diteladani dari jaringan pertemanan kaum eksil ini adalah komunikasi yang tidak pernah terputus dan terjaga dengan baik yang mereka sebut sebagai komunikasi “bawah tanah”. Melalui komunikasi bawah tanah ini pula mereka tetap mendapatkan berita dan informasi tentang perkembangan yang terjadi di tanah airnya selama di luar negeri. Komunikasi dengan keluarga dilakukan dengan berkirim surat dan menitipkan pesan melalui anak-anak Indonesia yang mampir untuk berkunjung ke rumah mereka.³ Dalam perkembangannya,

³ Wawancara dengan Kuslan Budiman di Woorden, Belanda, pada tanggal 30 Mei 2013.

setelah kejatuhan Uni Soviet di akhir tahun 1980-an, situasi politik yang penuh kekacauan memaksa kaum eksil yang tersebar di berbagai negara blok Timur bermigrasi ke negara-negara Eropa Barat, termasuk Belanda. Mereka mendaftarkan diri menjadi pencari suaka ke beberapa negara di Eropa Barat, termasuk ke Belanda.

Keputusan untuk mengajukan suaka ke Belanda dilakukan dengan berbagai pertimbangan. Pertimbangan *pertama* adalah jejaring, tersedianya jaringan sosial di Belanda. Sudah tentu tidak semua memiliki pertemanan di Belanda, akan tetapi beberapa kelompok aktivis hak asasi manusia bersedia mempersiapkan undangan untuk datang ke Belanda. Pertemanan dengan beberapa kolega yang sudah lebih dahulu menetap di Belanda, meminta bantuan kepada organisasi gereja, wartawan, dan organisasi politik seperti *Communist Partij Netherland* (CPN) untuk memudahkan proses pengajuan suaka politik mereka (Sipayung, 2011). Namun dalam menjalankan proses tersebut, penyiapan dokumen dan berbagai hal lainnya, mereka dibantu oleh salah seorang Profesor di Universitas Amsterdam yang bernama Prof. Wertheim yang memiliki kepedulian terhadap komunitas eksil Indonesia.⁴

Pertimbangan *kedua* yaitu dilihat dari konteks ke Indonesian, mereka yang sudah tinggal di Belanda memberikan informasi bahwa berdasarkan ketentuan pemerintah kolonial Hindia Belanda di tahun 1848, bahwa penduduk koloni Belanda akan disetujui sebagai warga negara Belanda dengan keterbatasan hak politik dan sosial. Oleh karena itu, penduduk Indonesia yang disebut sebagai bagian dari koloni Belanda adalah yang terlahir sebelum tahun 1949. Kebijakan dimanfaatkan oleh kaum eksil asal Indonesia untuk mengajukan penduduk tetap dan mengajukan naturalisasi kepada pemerintah Belanda. Mereka yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar sebagai pencari suaka tapi secara langsung mendaftar untuk penduduk tetap.⁵

⁴ Wawancara dengan Mintardjo, 25 Mei 2013, Leiden 2013

⁵ Wawancara dengan Kuslan Budiman, Woorden, tanggal 31 Mei 2013.

Berdasarkan konvensi Genewa, sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi kebijakan tentang suaka maka Belanda diwajibkan untuk menerima para suaka politik dan sekaligus membuat kebijakan tentang suaka. Namun demikian semua proses pendaftaran harus dijalani oleh pemohon sesuai kebijakan negara yang hendak memberikan suaka. Secara formal mereka yang meminta suaka biasanya adalah karena situasi terdesak oleh keadaan yang membahayakan dan terkait dengan kelangsungan hidup (Hamid, 2002). Berdasarkan ketentuan dalam statistic (CBS) negara Belanda yang disitir oleh Han Nicolaas (1999) disebutkan "*asylum seekers who are allowed to stay in the Netherlands and who are subsequently registered as immigrants, have the right, under certain circumstances, to bring their partner and/or child(ren) to the Netherlands (<http://www.cbs.nl>)*". Terdapat beberapa faktor yang menjadi syarat pengajuan permohonan suaka politik, yaitu:

- Situasi politik dari negara asal.
- Jumlah permintaan untuk mendapatkan suaka ke negara tersebut.
- Permintaan menjadi pencari suaka disetujui dan kemudian dapat mendaftarkan dirinya sebagai *asylum migrant* pada wilayah tempat tinggalnya.
- Adanya kebijakan pemerintah tentang pencari suaka.

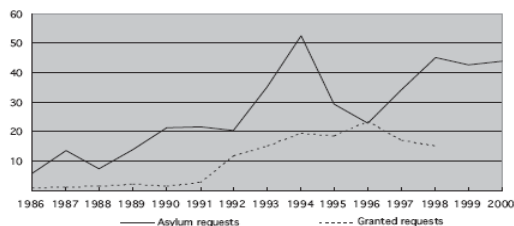
Proses mengajukan permohonan suaka politik ke Belanda dilakukan sebagai berikut:

- Mengajukan permohonan menjadi suaka melalui perwakilan negara yang hendak dimintai suaka.
- Pendaftaran untuk menjadi **asylum** dilakukan secara bertahap. Pada awal pendaftaran hanya kepala keluarga (suami) yang terdaftar sebagai pemohon, tidak termasuk istri dan keluarga. Ketika permohonan diterima, suami berangkat lebih dahulu, kemudian disusul oleh keluarga. Istri akan terdaftar sebagai imigran suaka pada tahun berikutnya.
- Wawancara dilakukan oleh lembaga *Aanmeldcentra* (ACs) atau *Application Centres* yang berada di bawah lembaga

yang disebut *Immigration and Naturalization Services* (IND).⁶

Proses penempatan para pencari suaka juga tidak menentu tergantung penawaran atas tempat tinggal yang di berikan oleh pemerintah Belanda karena mereka tinggal bukan di dalam rumah yang besar akan tetapi dalam barak-barak di mana dalam satu kamar akan diisi oleh 3 atau lebih pengungsi. Jika mereka satu keluarga biasanya akan diberikan kamar yang agak besar. Setiap bulan setiap orang akan diberikan uang saku sebesar 55 euro setiap minggunya.⁷

Jika dilihat dari statistik, ketika komunitas eksil mengajukan suaka di awal tahun 1990-an, terdapat pula pengajuan suaka dari kelompok lainnya, sehingga jumlah secara rinci berapa orang dari eksil yang mendaftar tidak jelas. Hanya diketahui bahwa pada masa itu terdapat sekitar 22.000 orang dari negara-negara bekas Uni Soviet yang mendaftar ke beberapa negara di Eropa Barat, seperti Jerman dan Belanda melalui UNHCR. Pada awal tahun 1990-an, negara telah mencatat bahwa terdapat sekitar 438.000 orang pencari suaka asal negara bekas Uni Soviet (Huntington, 1996). Pada tahun 1993 jumlah pencari suaka meningkat menjadi hampir 20 ribu, atau sekitar 17% dari total imigrasi di Belanda. Pada periode 1990-1996 hampir 100 ribu migran suaka dari banyak negara diperbolehkan masuk ke Belanda sebagai pencari suaka.



Source: Statistics Netherlands, 1999c and 2000.

Sumber: CBS, Belanda dalam Liesbeth Heering dan Helga de Valk, 1999; p. 254

Grafik: Jumlah Asylum dan Refugee di Belanda Tahun 1996-2000

⁶ Penerimaan terhadap permintaan suaka akan dilakukan dalam jangka waktu beberapa bulan, tergantung kepada proses hukum yang dijalaninya. Lembaga *Immigration and Naturalization Services* (IND) yang memutuskan dan menentukan ditolak atau diterimanya permintaan suaka tersebut (Ondieki Ngare, 2009; 10).

⁷ Wawancara dengan bapak K. Budiman di Woorden, Belanda pada tanggal 30 Mei 2013

Lembaga dunia yang menangani urusan suaka adalah UNHCR. Sejak tahun 1985, UNHCR berperan aktif dalam memasukan para kelompok asylum ke Belanda melalui lembaga yang disebut *the Dutch Council for Refugees*.⁸ Selain UNHCR, kelompok lainnya adalah agen-agen sukarela yang dipimpin oleh *European Consultation of Refugee and Exiles* (ECRE). Pihak-pihak yang tergabung dalam ECRE adalah kelompok advokat dan gereja. Kelompok yang tergabung dalam ECRE ini selain membantu proses masuknya para pencari suaka satu negara, juga ikut memperhatikan kondisi mereka ketika berada di penampungan. Pihak Gereja Protestan dan Katolik ikut memonitor kegiatan suaka di negara Eropa Barat dan berusaha untuk mempengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk para pencari suaka dan pengungsi.

MENJADI WARGA NEGARA BELANDA

Pengalamannya sebagai orang terbuang dan hidup dalam pengasingan tanpa identitas yang jelas memunculkan kesadaran bahwa memilih pindah dan menetap di Belanda barangkali akan lebih baik bagi mereka. Bermula dari permohonan menjadi suaka yang dilanjutkan dengan tindakan mengajukan naturalisasi. Pertimbangan untuk mengajukan permohonan naturalisasi disebabkan karena pemerintah Belanda memberikan peluang dan kemudahan untuk pengajuan naturalisasi salah satunya melalui kebijakan *minorities act* tahun 1983. Dalam ketentuan *minorities act* tahun 1983 dimungkinkan kepada orang asing mengajukan penduduk tetap selama persyaratan yang telah ditetapkan terpenuhi. Sejak keluarnya peraturan tersebut kelompok minoritas harus belajar bahasa dan budaya Belanda sesuai dengan motto yang dikeluarkan "*integration while preserving one's own identity*" (Siedenbug. 2004).

Kemudian di tahun 1984, kebijakan imigrasi Belanda memberikan peluang untuk

⁸ *The Dutch Council for Refugees* merupakan lembaga swadaya masyarakat yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok profesi seperti pengacara atau advokat yang berdiri tahun 1979 yang berkantor di Amsterdam (<http://www.ecre.org/alliance/members/profiles/members/55.htm>)

orang asing dan sudah berumur 18-25 tahun untuk mengajukan permohonan naturalisasi. Kebijakan imigrasi dan integrasi di Belanda di awal tahun 1990-an yang sangat berpihak pada imigran memudahkan untuk orang asing mengajukan permohonan naturalisasi (Castles and Miller, 2003, 237). Hal ini juga merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama dari bab 5 perjanjian Maastricht tahun 1991 (*the Maastricht Treaty 1991*) yang menetapkan bahwa pemerintah di negara-negara harus mulai memberikan perhatian kepada para imigran. Pada tanggal 30 September 1998 pemerintah membuat kebijakan integrasi yang baru yaitu *Newcomer Integration Act*. Mulai sejak tanggal disyahnkannya peraturan tersebut maka ditetapkan juga bahwa semua imigran baru yang masuk ke Belanda yang berumur di bawah 16 tahun dan berasal dari luar kawasan *European Union* (EU) atau *European Economic Area* (EEA) maka harus segera mendaftar untuk melakukan program integrasi (Siedenburg, 2004). Program integrasi tersebut memberikan syarat bahwa mereka yang akan mengajukan naturalisasi sudah memiliki kemampuan berbahasa Belanda, belajar budaya Belanda, memahami struktur sosial serta memiliki kemungkinan untuk mendapatkan kesempatan kerja di Belanda.

Setelah menjadi warganegara Belanda, ada hak-hak sipil yang diterima dan melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu (1) Tidak ada diskriminasi/dapat perlakuan yang sama, (2) Kebebasan beragama/beribadah, (3) Kebebasan berbicara, (4) Kebebasan berkumpul, berserikat, dan melakukan demonstrasi, (5) Menghormati hak personal atau privasi individual, dan (6) Tidak boleh mengganggu atau menyentuh tubuh seseorang.

Kendati sudah mendapatkan pengakuan sebagai warga negara, pemerintah masih memberikan ketentuan lainnya bahwa semua imigran harus mampu berintegrasi dengan budaya dan sistem sosial yang berlaku di Belanda. Rekonstruksi identitas baru sebagai warga negara Belanda seringkali hanya di atas kertas, namun ideologi dan rasa kebangsaan seringkali masih negara asalnya. Rekonstruksi masih sebagai suatu bentuk dari representasi terhadap dirinya

sendiri maupun orang lain. Identitas itu sendiri merupakan sumber pemaknaan dan pengalaman bagi seseorang karena menunjukkan proses konstruksi berdasarkan sifat-sifat budaya (Castells 1997, 6). Kepindahan kaum eksil ke Belanda tetap dengan komitmen politis mereka sebagai individu yang merasa menjadi bagian dari bangsa Indonesia meskipun mereka tidak tinggal lagi di tanah airnya. Keterikatan mereka sebagai anak bangsa masih terhubung dengan ideologi nasionalisme yang dibangun di bawah kepemimpinan era Orde Lama serta kekagumannya terhadap sosok presiden Soekarno. Hal inilah yang membedakan antara diaspora komunitas eksil dengan diaspora Indonesia lainnya, meskipun mereka berada pada negeri yang sama, yaitu Belanda. Sejarah pembentukan nasionalisme komunitas eksil berbeda dengan nasionalisme komunitas Maluku, meskipun mereka sama-sama diaspora Indonesia yang tinggal dan beranak pinak di Belanda. Diaspora eksil memiliki nasionalisme jarak-jauh karena ia mengandung unsur dan tujuan politik tertentu yang mengaitkan antara orang-orang dan tanah leluhurnya secara kuat (Mudzakir, 2013).

Cerita tentang seorang diaspora eksil dengan seorang diaspora Maluku akan tidaklah sama meskipun mereka memulai dengan proses yang sama. Migrasi dan menjadi pengungsi, tinggal di barak-barak tetapi alasan atas keberadaannya di Belanda menjadikan mereka berbeda dalam memaknai hubungan dengan atau relasi dengan tanah airnya. Seorang diaspora Maluku, membangun nasionalisme sebagai seorang pendatang untuk meminta pengakuan sebagai warganegara Belanda karena sejak awal sudah dijanjikan oleh Kerajaan Belanda. Mereka ditempatkan secara berkelompok pada beberapa perkampungan tersendiri oleh pemerintah Belanda (Gusnelly, 2011). Mereka bekerja dan mendapatkan rumah yang layak serta subsidi dari pemerintah Belanda.

AKTIVITAS SEBAGAI WARGA NEGARA BELANDA

Komunitas eksil hidup dengan nyaman di wilayah barunya, di mana segala kebutuhan hidupnya tercukupi, negara mengakomodir

kepentingan mereka dengan baik. Identitas baru sebagai warga negara Belanda, tetapi nasionalisme mereka tetap pada ideologi yang diajarkan oleh Soekarno, yaitu bangsa Indonesia. Mereka tetap mempertahankan komitmen politis terhadap negara Indonesia. Keberadaannya sebagai diaspora eksil di negeri Belanda kini, bahkan nanti akan jembatan atau jaringan sosial bagi orang Indonesia generasi berikutnya untuk datang ke Belanda. Era ekonomi global yang memperpendek jarak bahkan batas negara, meningkatkan banyaknya aktivitas transnasional, termasuk perpindahan orang. Komunikasi dengan keluarga sudah dapat dilakukan dengan mudah, tidak lagi melalui surat dan sembunyi-sembunyi, atau menitipkan pesan pada teman, akan tetapi sudah bisa komunikasi langsung. Sudah ada pula beberapa dari eksil yang mengundang kerabat, saudara dan teman datang ke Belanda, mencoba peruntungan baru di negeri Belanda.

Menciptakan masyarakat baru di negara yang baru akan memperkuat posisi migran. Jaringan sosial di antara komunitas akan dibangun sebagai salah satu akses untuk mempertahankan keberadaan mereka ditempat yang baru. Munculnya jaringan sosial yang terbangun karena adanya muatan primordialisme akan membantu pendatang baru untuk memahami budaya dan sosial ekonomi serta lebih mampu bertahan hidup di negara yang baru. Bagi para pelajar asal Indonesia, situasi ini sangat menguntungkan karena komunitas eksil sangat membantu untuk beradaptasi dengan budaya dan sistem pendidikan Belanda. Diskusi dan pertemuan pelajar asal Indonesia juga kerap difasilitasi oleh komunitas eksil ini.

Menarik sekali mengamati kehidupan komunitas eksil di Belanda yang sangat mencintai tanah airnya meskipun hidup dipenuhi oleh fasilitas asing. Mereka tinggal lama di luar negeri, menikah dengan perempuan asing, tetapi rasa cinta Indonesia dan kekeluargaan terhadap orang Indonesia masih dimiliki. Selama penelitian tentang diaspora Indonesia di Belanda, kami mendapatkan tumpangan di rumah pak Mintardjo. Mintardjo menikah dengan perempuan Rumania bernama Liliana dan memiliki 3 orang anak yaitu Heru, Ratnawati, dan Nurkasih. Nama anak Mintardjo begitu kental dengan nama Indonesia.

Anak-anak Mintardjo, tidak terbiasa dengan makanan Indonesia (Asia), padahal bapaknya (Mintardjo) sangat mencintai masakan Indonesia. Mereka tidak paham seperti apa budaya, masakan dan sistem sosial yang berlaku di tanah air ayahnya, namun ketika tinggal di Belanda, Nurkasih dan Heru belajar banyak tentang ke-Indonesia-an ayahnya. Di Belanda, ayahnya mulai terbiasa memasak makanan Indonesia, terutama ketika para pelajar Indonesia mulai berdatangan ke rumahnya. Nurkasih, Ratna dan Heru sudah bisa menikmati masakan Indonesia, seperti sup buntut, sate ayam, nasi goreng dan mie goreng ketika tinggal di Belanda. Semua berjalan secara natural. Jika tradisi bisa dipaksakan namun darah yang mengalir dan selera makanan tetap berlangsung secara natural.

Mintardjo menerima subsidi sebesar 900 euro setiap bulan.⁹ Ketika mereka baru pindah ke Belanda, ketiga anak-anaknya masih sekolah dan istrinya juga mendapatkan kesempatan bekerja. Mintardjo memperoleh pekerjaan di sebuah biro pemerintah Rumania di Bukares hingga 1989. Kemudian pindah ke Belanda dan bekerja pada sebuah perusahaan milik Belanda, sampai usia pensiun. Demikian pula dengan istrinya yang juga bekerja dan pensiun di usia 55 tahun. Mereka berdua mendapatkan pensiun dan juga uang subsidi dari pemerintah. Setiap bulan uang subsidi yang diterima Mintardjo berkisar antara 1200 euro, istrinya dibantu oleh negara sebesar 900 euro dan asuransi kesehatan. Setelah istrinya meninggal hanya Mintardjo saja yang tinggal di dalam rumahnya yang besar di daerah Oegstgeest, Leiden.¹⁰ Sebagai warga negara pendatang, Mintardjo tetap mendapatkan hak yang sama dengan warga negara pribumi. Baginya itu sudah

⁹ Bapak Mintardjo meninggal tahun 2015 yang lalu karena sakit selama liburan di Indonesia. Selama kami melakukan penelitian tentang diaspora Indonesia di Belanda, salah satunya tentang komunitas eksil, pak Mintardjo merupakan salah satu responden yang banyak membantu terutama saat kami melakukan FGD (diskusi) dengan komunitas eksil lainnya di rumahnya di Leiden. Meskipun dia sudah terusir dari tanah airnya karena mengemban tugas belajar atas perintah Soekarno, dia tetap tidak lupa tanah airnya karena itu ideologi yang sangat ditanamkan oleh bung Karno kepada para pengikutnya. Wawancara dengan Bapak Mintardjo 27 Mei 2013 di Leiden, Belanda.

¹⁰ Wawancara dengan Mintardjo, 27 Mei 2013 di Leiden, Belanda.

cukup, anak-anaknya sudah bekerja, menikah dan dia masih bisa menikmati liburan setiap tahunnya, bahkan 2 tahun sekali dia usahakan untuk pulang ke Indonesia. Peruntungan yang diharapkan itu akhirnya diperoleh juga di negeri Belanda.

Hal yang sama juga diperoleh oleh seorang eksil, dia memiliki identitas sebagai warga negara Belanda melalui naturalisasi, mendapatkan kembali hak-hak sebagai warga negara dari negeri Belanda. Jumlah diaspora eksil tidaklah banyak, mereka tinggal menyebar pada beberapa wilayah, sudah memiliki anak bahkan cucu. Ada yang tinggal di Den Haag, Leiden, Amsterdam, dan Utrecht. Subsidi dari pemerintah Belanda untuk rumah, asuransi dan pelayanan publik mereka dapatkan karena itu haknya sebagai warga negara. Kuslan Budiman, misalnya, tinggal di daerah Worden, Propinsi Utrecht. Dia menerima uang subsidi rumah sebesar 300 euro karena dia tidak menikah, dapat asuransi kesehatan dan juga biaya hidup.

Berkumpul bersama para pelajar atau mahasiswa asal Indonesia menjadi sebuah cara mereka mendapatkan kebahagiaan. Sejak berkembangnya teknologi komunikasi, internet (*email, facebook*), kaum eksil menemukan arena baru yang menembus batas-batas teritorial negara. Lebih lanjut juga diperoleh informasi dari mahasiswa Indonesia di Leiden bahwa tokoh eksil yang produktif dan mengelola blog adalah Ibrahim Isa dengan nama blog (<http://ibrahimisa.blogspot.com>). Mintardjo juga sangat aktif berinteraksi di media sosial *Facebook* baik secara pribadi maupun bergabung dalam komunitas *Leidener* yang dikelola oleh para mahasiswa asal Indonesia di Leiden. Tinggal dan sekolah di Leiden tidak mengalami kesulitan karena ada Mintardjo yang akan membantu beradaptasi. Kegiatan di PPI Belanda, terutama Leiden seringkali difasilitasi oleh Mintardjo dan teman-temannya.

Komunitas eksil di Belanda berpendapat bahwa oleh mereka adalah warga negara Belanda, mendapatkan hak dan melakukan kewajiban seperti warga negara lainnya. Belanda adalah pilihan terakhir untuk mereka menetap, mengurus dirinya dan menikmati masa tua dan

mungkin akan menjadi tempat terakhirnya ketika dijemput oleh kematian. Anak-anak mereka sudah berkeluarga, tinggal dengan pasangannya masing-masing, hanya sekali-kali saja mereka akan berkunjung ke rumah orang tuanya. Oleh karenanya, sebagai orang tua yang sudah berusia lebih 70 tahun, mengurus dirinya sendiri sudah harus dilakukan. Secara individual sebagai warga negara Belanda, peran negara adalah melindungi warga dalam melaksanakan haknya.

PENUTUP

Dalam sebuah negara seringkali tinggal beraneka macam bangsa, dan anggota suatu bangsa tidak selalu menempati negara yang sama. Suatu etnis dapat menunjukkan identitasnya sebagai bangsa pada sebuah teritori jika dia mendapatkan sumber-sumber ekonomi dan politik. Oleh karena itu, sebuah bangsa yang terbentuk karena terjadinya diaspora akibat adanya migrasi tidak dapat melepaskan ingatan tentang negeri asalnya karena nasionalisme tidak mengenal teritori. Sebenarnya hal ini sangat mengganggu dalam proses integrasi antara imigran dan pendatang pada sebuah negara karena ada pandangan bahwa menjadi warga negara bukan berarti harus menjadi nasionalis. Seorang imigran dan keluarganya bisa saja mendapatkan status kewarganegaraannya, berhasil melakukan penyesuaian dan bersosialisasi dengan penduduk lokal, namun belum pasti mendapatkan status sebagai seorang nasionalis dari sebuah negara yang didiaminya.

Terdapat perlakuan yang berbeda ketika kaum eksil melakukan proses tahapan pengajuan naturalisasi atau mendapatkan status kewarganegaraan resmi sebagai warga negara. Kaum eksil yang datang sebelum pecahnya Uni Soviet sedikit lebih beruntung karena tidak perlu mendaftar sebagai suka tapi secara langsung mendaftar untuk penduduk tetap. Sementara itu kaum eksil yang datang dari negara bekas Uni Soviet di awal tahun 1990-an harus menjalani tahap menjadi suka terlebih dahulu. Status mereka di awal adalah sebagai pencari suka atau imigran karena suka. Istri/anak atau keluarga akan ikut menetap di negara yang memberi suka setelah beberapa bulan menetap dan terdaftar pada

tahun berikutnya pada registrasi kependudukan setempat. Proses menuju penduduk tetap juga tidaklah mudah, ada yang membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun, tergantung atas kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh eksil tersebut.

Menjadi bagian dari masyarakat diaspora di Belanda, meskipun sulit akan tetapi lebih mudah mengingat kondisi Belanda sendiri sebagai negara kesejahteraan yang stabil dan kuat pada masa itu. Meskipun sebuah negara kecil dengan luas wilayah hanya 42.000 km, namun di negeri Belanda pula mereka dapat menemukan rumah baru yang mempertemukan kembali beberapa kelompok komunitas diaspora asal Indonesia lainnya. Belanda yang menjadi tempat tinggal mereka sekarang merupakan wilayah dan rumah baru dengan segala macam aturan dan kewajiban hukum yang harus dipatuhi sebagai warga negara. Mereka hanya menginginkan anak-anak mereka diberi kemudahan dalam mendapatkan akses baik di sektor ekonomi, politik dan sosial budaya.

Komunitas eksil sudah hidup di Belanda dengan 3 generasi yaitu anak dan cucunya. Generasi pertama adalah mereka sebagai orang eksil, lalu generasi kedua anak-anaknya, dan kemudian generasi ketiga adalah cucunya. Sebagai warga negara Belanda, anak keturunannya mendapatkan pendidikan dan bekerja di Belanda. Jiwa nasionalis anak-anak keturunannya mungkin adalah nasionalis Belanda atau Eropa, akan tetapi orang eksil tetap menjaga nasionalisme mereka buat tanah airnya, yaitu Indonesia.

PUSTAKA ACUAN

- Adam, Asvi Warman. (2009). *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Ombak.
- Adam, Asvi Warman. (1999). "Manipulasi Sejarah", dalam Tim Cidesindo, *Membuka Lipatan Sejarah: Menguak Fakta Gerakan PKI*, Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Budiawan. (2004). *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam.
- Crammer, John. (2002). *Diaspora and Identity: The Sociology of Culture in Southeast Asia, Malaysia*: Pelanduk Publication.
- Gusnelly. (2005). "Social integration and migrant mobility: a case study of Moluccans in the Netherlands" dalam Nur Aisyah Kotarumalos, *Crisis and Migration: A case study of Moluccans in the Netherlands*, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, LIPI
- Gusnelly. (2013). *Persoalam Kewarganegaraan Kaum Eksil*, laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
- Hamid, Sulaiman. (2002). *Lembaga Suaka Dalam Hukum International*. Jakarta; PT. Grafindo Persada
- Hill, David. (2008). "Knowing Indonesia From Afar: Indonesian Exiles and Australian Academics". Paper presented to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008.
- Hill, T, David. (2010). "Indonesia's exiled Left as the Cold War thaws", *Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, Vol. 44, No. 1.
- Imhoff, Evert van; 2004. "A Demographic History of the Indo-Dutch Population, 1930-2001". *Jurnal of Population Research*, Vol. 21, No.1.
- Kalra, Virinder S. dan Kaur Raminder. (2005). *Diaspora and Hybridity*. UK: Sage Publication.
- Mudzakkir, Amin. (2013) "Hidup di Pengasingan: Eksil Indonesia di Belanda", laporan penelitian P2SDR tahun 2013.
- Nicolaas, Han. (1999). "Family-network migration after asylum migration in the Netherlands, The Netherlands"; CBS Departement of Population (www.cbs.nl)
- Roodenburg, Hans, Rob Euwals dan Harry Terrele. (2004). "Effect og Immigrant on Labour Market and Government Budgets: The Case of Netherlands", *European Review*, Vol 12. No 3.
- Soysal, Yasemin Nuhoğlu. (1994). *Limits of Citizenship: Migrants and Post national Membership in Europe*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Setiawan, Hersri. (2004). "Membangun Kembali Budaya Rekonsiliasi" dalam Budiawan, *Mematahkan Pewarisan Ingatan: Wacana Anti-Komunis dan Politik Rekonsiliasi Pasca-Soeharto*. Jakarta: Elsam
- Shuval, Judith T. (2000). *Diaspora Migration: Definitional Ambiguities and a Theoretical Paradigm*. Cowley Road: Blackwell Publisher.
- Siedenburg, Anton W. (2004). "The Facts, Figures and Adjustments of the Dutch Newcomer Integration Act", see in Paper at the Workshop on Integration of Turkish Immigrants in Austria, Holland and Germany.
- Sipayung, Bambang Alfres. (2011). "Exiled Memories: The Collective Memory of Indonesian 1965

Exiles”. Tesis Master, International Institute of Social Studies, The Hague, Belanda.

Vasta, Ellie. (2006). “From Ethnic Minority to Ethnic Majority Policy: Changing Identities and the shift to Assimilationism in the Netherlands”, Working Paper no 26 of Centre on Migration, Policy and Society University of Oxford